

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

YOSEPH CAESARIO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

YOSEPH CAESARIO

A31115734



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

YOSEPH CAESARIO

A31115734

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 Januari 2017

Pembimbing I



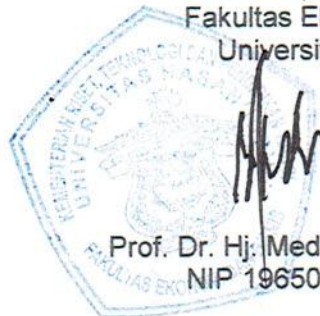
Dr. Ratna A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP 19670319 199203 2 003

Pembimbing II



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA
NIP 19590818 198702 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

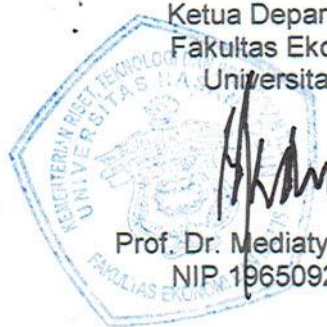
YOSEPH CAESARIO
A31115734


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 Januari 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ratna A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA	Ketua	1 
2.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2 
3.	Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3 
4.	Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Yoseph Caesario
NIM : A31115734
departemen/program studi : Akuntansi/S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH KOMPETENSI, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI
TERHADAP KUALITAS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 14 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,



Yoseph Caesario

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas cinta dan kasih-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, terima kasih peneliti ucapkan kepada Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA, dan Ibu Dra. Hj.Nurleni, Ak., M.Si., CA, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberikan bantuan literatur, dan berdiskusi dengan peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada segenap pembaca untuk tidak enggan memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Makassar, 14 Januari 2017

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Independensi terhadap Kualitas Audit Investigatif pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Effect of Competence, Objectivity, and Independence on Quality of Audit Investigative of Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Yoseph Caesario
Ratna Ayu Damayanti
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, objektivitas, dan independensi terhadap kualitas audit investigatif pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (primer) yang diberikan kepada auditor senior bidang investigatif ataupun yang pernah bertugas di bidang investigatif di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Kuesioner yang disebar sebanyak 55, namun yang dapat digunakan untuk pengolahan data sebanyak 50. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear dan menggunakan SPSS Ver.22. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, dan objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif sedangkan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif.

Kata kunci: kompetensi, objektivitas, independensi, kualitas audit investigatif

This study aimed to analyze the effect of competence, objectivity and independence towards the quality audit investigative on the Financial and Development Supervisory Agency of South Sulawesi province. The data collection is done by using a questionnaire (primary) given to senior investigative auditor or who has served in the field of investigative Financial and Development Supervisory Agency of South Sulawesi province. Questionnaires were distributed as many as 55, but which can be used for data processing as many as 50. The data were processed using linear regression analysis and using SPSS Ver.22. The findings show that the competence and objectivity of the auditor have positive effect on quality of audit nvestigative while the independence of the auditor does not affect the quality of audit nvestigative.

Keywords: competence, objectivity, independence, quality of audit investigative

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Atribusi.....	13
2.2 Kualitas Audit.....	15
2.3 Kompetensi.....	21
2.4 Objektivitas	29
2.5 Independensi	30

2.6	Kerangka Pemikiran.....	33
2.7	Pengembangan Hipotesis	35
2.7.1	Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif.....	35
2.7.2	Pengaruh Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif.....	36
2.7.3	Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Rancangan Penelitian	38
3.2	Tempat dan Waktu.....	39
3.3	Populasi dan Sampel	39
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	41
3.6.1	Kualitas Audit	41
3.6.2	Kompetensi	42
3.6.3	Objektivitas	43
3.6.4	Independensi	44
3.7	Instrumen penelitian.....	45
3.8	Analisis Data	45
3.8.1	Statistik Deskriptif.....	45
3.8.2	Model Analisis Data	46
3.8.3	Uji Kualitas Data	46
3.8.4	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.8.5	Uji Hipotesis	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN	51
4.1	Deskripsi Data.....	51
4.2	Karakteristik Responden	51
4.3	Uji Validitas	52
4.4	Uji Reabilitas	55
4.5	Uji Asumsi Klasik – Normalitas.....	57
4.6	Uji Asumsi Klasik – Multikolinearitas	59

4.7	Uji Asumsi Klasik – Heteroskedastisitas.....	60
4.8	Analisis Regresi	60
4.9	Uji Hipotesis.....	63
4.10	Pembahasan.....	65
4.10.1	Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit Investigatif.....	65
4.10.2	Pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Audit Investigatif.....	66
4.10.3	Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit Investigatif.....	67
BAB V	PENUTUP.....	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Keterbatasan Penelitian	69
5.3	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	75
	LAMPIRAN 1	76
	LAMPIRAN 3	84
	LAMPIRAN 4	90

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
Tabel 2.1 Kompetensi Umum.....	25
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	52
Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel Kompetensi	53
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Objektivitas.....	53
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Independensi.....	54
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Kualitas Audit Investigatif.....	54
Tabel 4.6 Uji Reabilitas Variabel Kompetensi	55
Tabel 4.7 Uji Reabilitas Variabel Objektivitas.....	56
Tabel 4.8 Uji Reabilitas Variabel Independensi.....	56
Tabel 4.9 Uji Reabilitas Variabel Kualitas Audit Investigatif	57
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas.....	60
Tabel 4.12 ANOVA.....	60
Tabel 4.13 Critical Value for T Distribution.....	61
Tabel 4.14 Critical Value for F Distribution.....	61
Tabel 4.14 Koefisien Regresi.....	61

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Uji Normalitas Variabel Kompetensi	57
Gambar 4.2 Uji Normalitas Variabel Objektivitas	57
Gambar 4.3 Uji Normalitas Variabel Independensi	57
Gambar 4.4 Uji Normalitas Variabel Kualitas Audit Investigatif	58
Gambar 4.5 Koefisien Regresi Linear Berganda.....	63
Gambar 4.6 Koefisien Variabel Kompetensi	63
Gambar 4.7 Koefisien Variabel Objektivitas	64
Gambar 4.8 Koefisien Variabel Independensi.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Biodata	75
Lampiran 2 Peta Teori/ Penelitian Terdahulu	76
Lampiran 3 Kuisisioner Penelitian	83
Lampiran 4 Uji Statistik	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi sudah dianggap penyakit moral. Ada kecenderungan intensitas dan modusnya semakin berkembang dengan penyebab *multi factor*. Korupsi terjadi secara sistematis yang melibatkan semua unsur terkait yang terjadi di berbagai instansi seperti unsur Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah maupun kelompok masyarakat.

Meskipun upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi telah dilakukan secara sungguh-sungguh antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, namun upaya pemerintah tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Era otonomi daerah membawa dampak positif pada satu sisi dan dampak negatif pada sisi lainnya. Semakin terarahnya kegiatan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah merupakan salah satu dampak positif. Pada sisi lain seiring dengan bertambahnya kewenangan dan semakin

besar jumlah dana yang dikelola daerah telah mendorong semakin besarnya potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi mulai bergeser dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Selain itu, korupsi yang terjadi di daerah tidak hanya melibatkan pihak eksekutif tetapi juga melibatkan pihak legislatif.

Di sektor Pemerintahan, khususnya di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, praktik korupsi dilakukan dengan berbagai bentuk dan modus operandi yang bervariasi. Modus tersebut diantaranya dengan melakukan legalisasi suatu kondisi/aktivitas melalui kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh pihak eksekutif maupun pihak legislatif untuk memperkaya diri sendiri atau golongan. Disamping itu maraknya bantuan program Pemerintah Pusat/Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan mengatasnamakan kelompok sosial/masyarakat sehingga pada akhirnya bukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi menyengsarakan masyarakat dan merugikan keuangan negara.

Contoh kasus korupsi yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan diantaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Fort Rotterdam Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah anggaran 24,3 miliar rupiah yang diusut oleh pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Tahun 2012. Pada kasus tersebut modus operandinya adalah *Mark Up* nilai anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai kuasa anggaran dan oleh pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.

Terkait hal tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah instansi pemerintah yang menghasilkan berbagai produk jasa pelayanan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah lainnya. Berbagai produk jasa pelayanan yang dihasilkan BPKP pada dasarnya merupakan produk

jasa pelayanan yang tersedia di pasar dan biasanya diproduksi oleh BPK dan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi seperti kantor akuntan publik. Penggunaan produk jasa BPKP oleh instansi pemerintah pada dasarnya merupakan keinginan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, hal ini memang karena tidak ada keharusan bagi suatu instansi pemerintah untuk menggunakan jasa layanan BPKP. Salah satu jasa layanan yang dihasilkan BPKP adalah layanan audit investigasi, jasa audit investigasi ini diberikan terutama untuk memenuhi permintaan penyidik seperti Kejaksaan dan Kepolisian terkait penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara. Layanan audit investigasi yang diberikan kepada pihak penyidik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembuktian kasus tindak pidana korupsi dalam proses hukum di pengadilan. Dalam proses pembuktian kasus pidana ini, auditor investigasi biasanya diminta menjadi pemberi keterangan ahli dalam persidangan di pengadilan.

Saat ini kebutuhan terhadap jasa audit investigasi semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat luas berharap adanya peningkatan kemampuan penyidik dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Demikian juga pihak penyidik sangat mengharapkan bantuan layanan audit investigasi yang berkualitas dari BPKP guna membantu pengungkapan berbagai kasus dugaan korupsi yang ditanganinya.

Dalam periode 2003-2008, BPKP memegang peran terbesar dalam kegiatan audit investigasi untuk membantu pihak penyidik (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dibandingkan dengan peran yang telah diberikan oleh lembaga audit lainnya termasuk BPK (Tuanankotta, 2009:202). Dalam penanganan kasus

tindak pidana korupsi tersebut, auditor investigasi BPKP berperan aktif dalam setiap tahapan proses penegakan hukum oleh penegak hukum, yaitu sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan proses penuntutan di pengadilan.

Peran besar auditor investigasi BPKP secara nasional dalam proses penegakan hukum atas berbagai kasus tindak pidana korupsi juga terjadi secara regional di wilayah hukum Sulawesi Selatan yang diperankan oleh auditor investigasi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan setiap tahunnya terjadi peningkatan peran auditor investigasi BPKP Sulawesi Selatan sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani pihak penyidik di wilayah hukum Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan BPKP tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dengan dibentuknya suatu tim audit investigasi yang terdiri dari anggota, ketua, pengendali teknis dan pengendali mutu. Seorang ketua tim dan anggota tim bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pembuatan laporan dari audit investigasi sedangkan pengendali teknis dan pengendali mutu berfungsi sebagai supervisi terhadap proses audit dan penerbitan laporan audit. Seorang ketua tim audit berperan sangat penting dalam proses audit investigasi karena ketua tim yang menentukan prosedur pelaksanaan mencari temuan audit investigasi tersebut.

Sepanjang tahun 2015, tercatat 51 (Lima Puluh Satu) kasus tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Selatan yang ditangani oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan melalui kegiatan audit investigasi. Meningkatnya permintaan penyidik terhadap jasa layanan audit investigasi guna membantu pengungkapan berbagai kasus korupsi ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan termasuk kualitas dari audit investigasi.

Namun demikian, BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tampaknya belum sepenuhnya dapat mengimbangi peningkatan permintaan layanan audit investigasi dengan peningkatan kinerjanya sesuai dengan harapan penyidik dan masyarakat luas. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari adanya keluhan dari berbagai pihak seperti penyidik dan masyarakat luas terhadap kualitas layanan audit investigasi yang diberikan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan sebagaimana sering dimuat dalam berbagai media masa atau keluhan yang disampaikan langsung oleh pihak terkait kepada auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Diantaranya adalah terkait dengan lambannya penyelesaian penugasan audit oleh auditor BPKP sehingga laporan belum dapat diterbitkan. Adanya batasan kondisi ini akan berimbas pada terhambatnya proses pelimpahan kasus di persidangan. Kurangnya kemampuan komunikasi antara auditor dengan pihak penyidik dan adanya batas waktu penanganan kasus oleh pihak penyidik menjadi faktor penghambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Kemudian Tubbs (1990) dalam artikel yang sama berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut.

Potensi untuk menemukan *fraud* tergantung kepada waktu dan keahlian auditor, untuk itu kompetensi merupakan hal yang penting dimiliki oleh auditor investigatif. Kelemahan auditor biasanya terlihat dari kebiasaan melaporkan temuan mereka. Temuan yang begitu penting dapat berakhir dengan kalimat tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup (Tuanakotta, 2007:45).

Theodorus M.Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2010:106) menyebutkan bahwa “tiga sikap dan tindak pikir yang selalu harus melekat pada diri seorang auditor Investigatif, yakni Independensi, Objektivitas, dan skeptis. Ketiga sikap dan tindak pikir juga tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan auditor forensik atau investigatif.” Ringkasan standar umum dan standar khusus auditor investigatif dalam buku Tuanakotta (2010:122) menyebutkan bahwa auditor investigatif harus independen dalam melaksanakan tugasnya dan juga harus objektif (tidak berpihak) dalam melaksanakan telaah audit investigatif nya. Oleh karena itu tidak hanya kompetensi tetapi juga independensi dan objektivitas yang diperlukan oleh seorang auditor investigatif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Laporan Audit bidang Investigasi BPKP sangat berpengaruh pada penanganan kasus tindak pidana korupsi baik laporan audit Investigatif maupun laporan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, oleh karena itu kualitas laporan tersebut harus sebaik mungkin agar tidak terjadi salah dalam menentukan simpulan laporan tersebut.

De Angelo dalam Kusharyanti (2003:27) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan

salah saji tergantung pada independensi auditor. Sementara itu AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002:83) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi”. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Tidak mudah menjaga independensi dan objektivitas seorang auditor investigatif. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Alim *et al.*, (2007:17) menyatakan bahwa kerjasama dengan objek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor tersebut. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan objek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi objektivitas auditor, serta bukan tidak mungkin seorang auditor investigatif menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas dan etika auditor. Oleh karena itu merupakan hal menarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor independensi, objektivitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit investigatif.

Banyak kasus penyelewengan yang terjadi di kalangan auditor terkait dengan kompetensi, objektivitas, dan independensinya sebagai auditor. Bahwa salah satu auditor BPK yakni kasus audit Bagindo Quirino menerima dana suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenkertrans) terkait temuannya dimana suap tersebut diberikan Bagindo agar tidak melaporkan semua temuannya dalam kasus korupsi penyelewengan dana anggaran belanja tambahan (ABT) (Rizky, 2009:20).

Fenomena lain terkait pada kasus Hambalang yang tidak ada sinkronisasi antara fakta temuan dengan data-data kerugian yang dialami menurut Agus D.W. Martowardojo beliau yang dahulu menjabat sebagai Menteri

Keuangan mengemukakan ada 10 bentuk pelanggaran, yaitu terkait surat keputusan hak pakai, terkait lokasi dan *site plan*, terkait izin mendirikan bangunan, tentang teknis, terkait revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), terkait permohonan kontrak tahun jamak, terkait persetujuan RKA-KL 2011, terkait pelelangan, terkait pencairan anggaran 2010, dan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Gatra, 2012).

Sepuluh temuan audit BPK tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit hambalang menimbulkan pernyataan ambigu mengenai laporan keuangan serta pertentangan prinsip kewajaran laporan keuangan (Johnstone *et.al*, 2013:16).

Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diharapkan tidak terjadi cara audit yang tidak jujur dan akurat serta banyak terjadi penyimpangan. Hal tersebut mengenai sejumlah auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diungkapkan turut menerima “uang haram” saat penyusunan SOP kegiatan audit pengawasan dan pemeriksaan sarana prasarana bersama dengan Itjen Kemendiknas. Agus D.W. Martowardojo selaku menteri keuangan menyesalkan khususnya di Itjen dan BPKP menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, selain untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif, juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meminimalisasi penyimpangan anggaran dan korupsi di Kementerian (Putranto, 2013).

Beberapa fenomena di atas merupakan kasus pelanggaran mengenai tindak pidana korupsi dan perihal mengenai pentingnya kompetensi, objektivitas dan independensi seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit investigasi yang bermutu. Untuk itu dalam memberikan kualitas audit investigatif

diperlukan kompetensi yang terdiri atas pengetahuan, pengalaman, dan sikap mental yang baik. Aspek penting yang diperlukan lainnya adalah independensi yang terdiri atas penyusunan program, verifikasi investigatif serta pelaporan dan juga objektivitas yaitu sikap mental yang tidak berpihak kepada siapapun. Dengan adanya kompetensi, objektivitas dan independensi yang dimiliki auditor maka akan menumbuhkan sikap *professional* dalam melakukan pekerjaannya.

Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP,1998).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukriah *et al.* (2009), Wirahadi *et al.* (2011), Yusuf (2014), Yusnita (2009), Kharismatuti (2011), Perdany *et al.* (2012), Linting (2013), dan alim *et al.* (2007) menyimpulkan bahwa kompetensi berdampak positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2011) menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Dari segi objektivitas terdapat beberapa penelitian yang terdahulu Sukriah *et al.* (2009), dan Yusuf (2014) menyimpulkan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Linting (2013) menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Untuk independensi juga terdapat beberapa penelitian antara lain Wirahadi *et al.* (2011), Yusnita (2009), Irawati (2011), Kharismatuti (2011), Perdany *et al.* (2012), Linting (2013), dan Nizarulalim *et al.* (2007) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah (2009) menyimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Atas dasat latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit Investigatif pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan?
- 2) Apakah objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan?
- 3) Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh kompetensi, objektivitas, dan independensi terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk

- 1) Menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Menganalisis pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

- 3) Menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan teori akuntansi di Indonesia, khususnya di bidang auditing yang membahas seputar kompetensi, objektivitas, dan independensi auditor BPKP terhadap kualitas audit investigatif.
2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan kompetensi objektivitas, dan independensi auditor BPKP terhadap kualitas audit investigatif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit investigatif pada BPKP provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi auditor BPKP khususnya mengenai pentingnya kompetensi, objektivitas, dan independensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya khususnya audit investigatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012) yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini. Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kerangka pemikiran teoretis, ringkasan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang dilakukan.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan deskripsi data, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah, saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait serta hambatan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1996) dalam Sukriah (2009:31), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005) dalam Ayuningthyas (2011:12)

Teori atribusi menurut Ikhsan dan Ishak (2005:55) merupakan suatu proses untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku seseorang. Teori ini ingin menjelaskan tentang perilaku seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dan mengetahui alasan-alasan melakukan perilaku seperti itu. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins (2006:172) menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions* (Luthans, 2005). *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Perilaku individu menurut Robbins (2006:172) disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali atau berasal dari dalam diri individu seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang diyakini sebagai hasil dari sebab-sebab luar atau berasal dari luar diri individu seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Heider (2005) juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.2 Kualitas Audit

Sama halnya dengan akuntansi, maka audit dapat disandarkan pada filsafat publik pada sisi kebebasan publik untuk bertanya mengenai kualitas asersi (akuntabilitas) yang dilakukan oleh agen. Auditor independen mewakili publik dalam menilai kewajaran laporan keuangan, dalam rangka menjaga kepentingan publik. Dalam konteks ini, hukum Gresham berlaku efektif bahwa yang rasional mengalahkan yang kurang rasional, bahwa yang berdasarkan bukti mengalahkan yang tanpa bukti. Dengan demikian, filsafat audit mempunyai

filosofi: ” tunjukkan, buktikan, maka aku percaya ”. Artinya bahwa, simpulan hasil audit dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh auditor selama proses audit.

Audit adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens dan Loebbecke, 2007:4).

Pekerjaan utama dari audit adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang merupakan segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam rangka menentukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Arens dan Loebbecke, 2007:5). Bukti audit adalah sesuatu yang dapat membuktikan (Sawyer, 2003), yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (Standar Profesional Akuntan Publik, 2006)

Audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya, yaitu:

1. Audit Keuangan (*Financial Audit*)

Audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk menilai kelayakan/kewajaran atas penyajian laporan keuangan (pemberian opini), contoh opini adalah wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak memberikan pendapat (*disclaimer*), dan tidak wajar (*adverse opinion*).

2. Audit Kinerja (*Performance Audit*)

Audit yang dilakukan untuk menilai pencapaian kinerja suatu entitas/organisasi.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit yang dilakukan terhadap program/kegiatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tujuan dapat dicapai secara efisien, efektif, dan ekonomis.

4. Audit Investigasi (*Fraud Audit*)

Audit yang dilakukan dalam rangka pembuktian dugaan kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Kualitas audit menurut Kharismatuti (2012:27) berhubungan dengan jumlah respon yang benar yang diberikan seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dibandingkan dengan standar hasil atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. De Angelo (1981) dalam Kharismatuti (2012:27) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien. Kualitas audit bertujuan menyakinkan profesi bertanggungjawab kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu profesional auditor. Kualitas audit menurut Sari (2011:14) yaitu fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya.

Pengukuran kualitas audit yang dikemukakan oleh Moizer dalam Irawati (2011:23) terpusat pada kinerja yang dilakukan oleh auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan, sedangkan pengukuran kualitas audit menurut Sari (2011:29) yaitu “kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas

tanpa memihak (Independent), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi”.

Menurut Lowensohn *et al.* (2007) dalam Perdani (2012:7), kualitas audit dapat diukur dengan tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Menggunakan proksi kualitas audit, misalnya ukuran auditor, kualitas laba, reputasi KAP, besarnya *audit fee*, adanya tuntutan hukum pada auditor.
- 2) Pendekatan langsung, misalnya dengan melihat proses audit yang dilakukan dan melihat sejauh mana ketaatan KAP terhadap standar pemeriksaan audit.
- 3) Menggunakan persepsi berbagai pihak terhadap proses audit yang dilakukan KAP.

Dalam konteks sektor pemerintahan di Indonesia, pendekatan kedua dan ketiga dapat diterapkan di Indonesia, namun untuk pendekatan pertama yang dirangkum oleh Lowensohn *et al.* (2007) dalam Perdani (2012:8) dengan menggunakan proksi seperti ukuran auditor, kualitas laba, reputasi KAP, besarnya *audit fee*, maupun tuntutan hukum pada auditor tidak dapat diterapkan. Hal ini karena BPKP adalah salah satu lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara, sehingga proksi tersebut tidak bisa sebagai proksi kualitas audit pada lembaga pemerintah.

Fraud audit atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan investigatif merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif baru. Jika *financial audit* (pemeriksaan keuangan) dan *performance audit* (pemeriksaan kinerja) telah dikenal relatif lama dalam dunia pemeriksaan, maka pemeriksaan investigatif yang berhubungan dengan pengungkapan tindak kecurangan (*fraud*) baru dikenal pada abad ke-20,

diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis

Soepardi (2010:36) menjelaskan bahwa Audit Investigatif adalah serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen.

Audit investigasi dilaksanakan karena adanya pengaduan masyarakat atas dugaan KKN, pengembangan temuan-temuan audit reguler (audit keuangan, audit operasional, dan bentuk audit lainnya), permintaan oleh instansi penyidik dalam penanganan kasus TPK, dan permintaan dari instansi pemerintah non-penyidik untuk menuntaskan kasus-kasus penyimpangan keuangan yang terjadi di unit kerjanya.

Prinsip utama dalam audit investigatif adalah bahwa audit investigatif adalah tindakan mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor mengumpulkan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan simpulan sendiri bahwa telah terjadi atau tidak terjadi penyimpangan dan pihak yang diduga terlibat/terkait teridentifikasi. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi auditor investigatif untuk memberikan opini tanpa didasarkan oleh fakta-fakta yang ada.

Kegiatan audit investigatif mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan. Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama. Penggunaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan audit investigatif, bukan merupakan pengganti dari audit investigatif. Auditor harus

memperoleh bukti fisik yang mungkin akan disampaikan kepada tenaga ahli untuk pengujian lebih lanjut.

Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam audit investigatif diharapkan memenuhi kriteria relevan, material dan kompeten. Bukti dianggap cukup relevan jika bukti tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian bukti-bukti (*chain of evidence*) yang menggambarkan suatu proses kejadian atau jika bukti tersebut secara tidak langsung menunjukkan kenyataan dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan. Materialitas bukti dalam audit investigasi menekankan pada hubungan bukti terhadap sangkaan yang diindikasikan. Sedangkan kompetensi bukti dikaitkan dengan bentuk, sumber dan cara perolehannya.

Bukti-bukti dalam audit investigatif juga sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan bukti untuk proses litigasi. Masalah bukti diatur dalam pasal 183 sampai dengan 189 Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, penjatuhan pidana pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sedangkan jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal 184 KUHP meliputi Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Dalam suatu proses peradilan pidana, Bemelem dalam Mulyadi (2010:13) menyampaikan dalil bahwa:

“Masing-masing pihak dalam suatu persidangan, yaitu Jaksa Penuntut Umum, Pembela/Penasihat Hukum, dan Hakim adalah mempunyai fungsi yang sama, meskipun mereka masing-masing mempunyai posisi yang

berbeda, maka sudah selayaknyalah masing-masing pihak mempunyai pendirian yang berbeda pula.”

Dari dalil tersebut, mengenai adanya perbedaan posisi tersebut maka dalam proses persidangan semua pihak selalu berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa, dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran materiil yang sesungguhnya. Dengan demikian, setiap kasus yang dianggap kontroversial sekalipun pasti akan disertai dengan adanya argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan.

Dari penjelasan pada latar belakang dan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit investigasi pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sangat ditentukan oleh empat faktor, yaitu:

1. Kecepatan dalam penyelesaian penugasan audit dan kecepatan dalam penyampaian laporan hasil audit kepada pihak penyidik atau instansi pemerintah yang meminta.
2. Adanya komunikasi yang baik antara auditor dengan pihak penyidik/jaksa penuntun umum (JPU) atau instansi pemerintah lain yang meminta.
3. Laporan hasil audit telah memenuhi kebutuhan penyidik atau instansi pemerintah yang meminta (professional, lengkap, akurat, objektif, jelas, dan meyakinkan.)
4. Auditor memiliki kemampuan yang memadai untuk tampil sebagai pemberi keterangan ahli (saksi ahli) di persidangan (PPBI,2010)

2.3 Kompetensi

Kompetensi menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI) (2004:33) adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan kapabilitas, keahlian, pengalaman, keterampilan, sikap, kecakapan, dan pengetahuan yang

dimiliki dalam melakukan tugasnya dengan teliti, cermat, dan objektif. Definisi lain yang dikemukakan oleh Yusnita (2009:4) yaitu kompetensi auditor adalah kemampuan, pengetahuan, dan disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Menurut Arens (2007:46) kompetensi adalah kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang diperoleh melalui latar belakang pendidikan formal auditing dan akuntansi, pelatihan kerja yang cukup dalam profesi dan akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan.

Kompetensi auditor dapat tercapai apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor memiliki keahlian, menerapkan kecermatan professional, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam. Auditor juga dituntut untuk menguasai disiplin ilmu lain yang mendukung pekerjaannya dan mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

Selain pengetahuan, kompetensi juga menggunakan pengalaman sebagai pengukurannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengalaman seperti lamanya waktu dalam bekerja di bidangnya. Pengalaman diasumsikan dengan mengerjakan sesuatu tugas berulang kali, maka akan memberikan kesempatan mengerjakannya dengan lebih baik. Pengalaman auditor juga merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan profesinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai pemeriksa yang harus mampu memberikan masukan ataupun pendapat berupa rekomendasi perbaikan.

Standar kompetensi auditor menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010 adalah Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Standar Kompetensi Auditor terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan.

Standar Kompetensi Auditor adalah standar minimal dalam praktik audit di lingkungan APIP. Seluruh auditor didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya di atas standar ini, misalnya dengan memperoleh kompetensi spesialis melalui kualifikasi formal seperti mengikuti sertifikasi yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) maupun organisasi profesi lainnya, termasuk memperoleh sertifikasi di bidang pengawasan yang bersifat khusus/spesialis melalui diklat teknis substansi pengawasan.

Untuk menjabat sebagai auditor, setiap PNS wajib memenuhi persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010, kompetensi umum terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor. Kompetensi umum yang merupakan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor dijabarkan pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Kompetensi Umum

NO	Kompetensi Umum	Level Kompetensi Umum	
		Auditor Terampil	Auditor Ahli
1.	Dorongan untuk berprestasi	Mampu memenuhi standar prestasi atau target yang telah ditetapkan oleh manajemen/pimpinan.	Mampu membuat suatu perubahan spesifik dalam sistem atau metode kerja untuk meningkatkan prestasi kerja (bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan inovatif).

NO	Kompetensi Umum	Level Kompetensi Umum	
		Auditor Terampil	Auditor Ahli
2.	Pemikiran Analitis	Mampu bekerja dengan menggunakan aturan dasar, logika, dan pengalaman masa lampau, serta bekerja dengan pola kecenderungan (pattern) dalam mengidentifikasi masalah	Mampu membuat situasi atau ide yang kompleks menjadi jelas, sederhana, dan mudah dimengerti dengan menyusun suatu penjelasan yang berarti. Mampu menyampaikan observasi atau pengetahuan yang ada dengan cara sederhana. Mampu memadukan ide-ide dan informasi dan membuat gambaran yang lebih besar menjadi lebih lengkap dan jelas.

NO	Kompetensi Umum	Level Kompetensi Umum	
		Auditor Terampil	Auditor Ahli
3.	Orientasi Pengguna	Mampu memenuhi permintaan pengguna dan memastikan apakah jasa/pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna.	Mempunyai inisiatif untuk mencari tahu kebutuhan jasa/pelayanan apa yang diinginkan dan bisa menyesuaikan jasa/pelayanan tersebut dengan kebutuhan pengguna.
4.	Kerja sama	Mampu bekerja sama dengan orang lain serta peduli dengan tugas dan permasalahan orang lain dengan cara memberikan saran, masukan, bahan pertimbangan, atau solusi.	Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, permasalahan, dan kemajuan kelompok serta mengajak orang lain untuk terlibat di dalam kegiatan kelompok.

NO	Kompetensi Umum	Level Kompetensi Umum	
		Auditor Terampil	Auditor Ahli
5.	Manajemen stres	Mampu bekerja dalam situasi yang penuh tekanan dan keterbatasan dengan menerapkan metode bekerja sesuai standar.	Mampu menangani pekerjaan sehari-hari dengan percaya diri, mudah beradaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan. Mampu menunjukkan kelenturan pada waktu dihadapkan pada tugas yang sulit atau berbeda pada saat yang bersamaan. Mampu menunjukkan kinerja dalam situasi yang mendesak (darurat, periode yang sangat sibuk, tenggat waktu).
6.	Komitmen Organisasi	Memiliki kemampuan dan kemauan untuk Menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan sasaran organisasi.	Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendukung organisasi secara aktif serta berusaha menjaga dan menampilkan citra organisasi yang baik.

Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan. Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan meliputi 7 bidang kompetensi yang dikategorikan dalam kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial.

Ketujuh bidang kompetensi pengawasan yang dimaksud adalah:

1. Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik;
2. Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan;
3. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan;
4. Kompetensi Bidang Sikap Profesional;
5. Kompetensi Bidang Komunikasi;
6. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan;
7. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan.

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko. Oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memiliki kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik. Selanjutnya agar auditor dapat melaksanakan pengawasan secara profesional maka diperlukan kompetensi bidang strategi pengawasan, yaitu bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, serta teknik dan metode pengawasan yang digunakan. Ini meliputi berbagai bentuk pengawasan sesuai PerMenPAN nomor: PER/220/M.PAN/7/2008. Pengawasan yang dilakukan tidak akan berarti apabila tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah. Oleh karenanya

kompetensi di bidang pelaporan hasil pengawasan penting untuk dimiliki auditor agar hasil penugasan pengawasan dapat mendorong perbaikan bagi auditan dalam mengelola organisasinya serta mengendalikan dan mengelola risiko di dalam organisasinya. Sementara itu, kompetensi bidang sikap profesional memastikan auditor berperilaku yang mencerminkan profesionalismenya, baik pada saat sedang melaksanakan penugasannya maupun di luar penugasan pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, kompetensi di bidang komunikasi akan membantu memberikan keyakinan bahwa komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat dimengerti. Selain itu pemahaman auditor mengenai faktor-faktor tertentu dan isu-isu terkait pemerintahan yang terangkum dalam kompetensi bidang lingkungan pemerintahan akan mendukung hasil pengawasan yang realistis dan dapat diterima pihak-pihak terkait.

2.4 Objektivitas

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki objektivitas. Auditor tidak boleh menempatkan penilaiannya atau menilai sesuatu berdasarkan penilaian orang lain. Objektivitas menurut Muljono (1987:14) merupakan suatu sikap yang perlu dikembangkan oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Kode Etik dan Standar Audit yg dikeluarkan oleh Pusdiklatwas BPKP menyebutkan bahwa Auditor harus menjunjung tinggi ketidak-berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit. Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Seorang auditor harus selalu bertindak secara objektif berdasarkan bukti-bukti otentik yang diperolehnya selama melakukan pemeriksaan dan sebelum melaporkan hasil auditnya perlu mengadakan review dan pengujian kembali atas data/fakta/informasi yang diperolehnya. Objektivitas adalah suatu sikap mental independen yang harus dijaga oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Objektivitas mengharuskan auditor untuk melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga para auditor meyakini hasil pekerjaannya dan tidak melakukan kompromi terhadap kualitas pekerjaan yang signifikan (KOPAI, 2004:47). Oleh karena itu, auditor harus mengambil keputusan profesional secara bebas dan obyektif. Dengan adanya sikap objektivitas, penilaian yang dihasilkan tidak bias, tidak memihak, dan bukan merupakan hasil kompromi (Yusnita, 2009:18).

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Yusuf (2014:8) Unsur perilaku yang dapat menunjang objektivitas antara lain:

- 1) Dapat diandalkan dan dipercaya.
- 2) Tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa.
- 3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain.
- 4) Dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi.
- 5) Dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

2.5 Independensi

Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga

kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Christiawan, 2002:86).

Auditor dikatakan profesional dalam melaksanakan tugasnya jika memiliki independensi. Menurut Hery (2010:74) dalam Linting (2013:12) independensi adalah suatu kemandirian yang dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka. Sedangkan menurut Sawyer's *et al.* independensi (2005:7) merupakan suatu sikap yang harus bebas dari hambatan, memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah yang sebenarnya, bukan berdasarkan keinginan eksekutif atau lembaga. maka Independensi auditor pemerintah adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor pemerintah berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor pemerintah. Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998) dalam Perdany (2012:9). Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya".

Mautz dan Sharaf (1993) dalam Perdany (2012:9) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi mengenai independensi auditor yang dapat meminimalisasi atau mengeliminasi potensi ancaman objektivitas auditor, antara lain meliputi :

- 1) Pemrograman Independensi, yang mencakup hal bebas dari campur tangan manajerial dalam program audit, bebas dari campur tangan dalam prosedur audit, bebas dari permintaan evaluasi dari pekerjaan audit selain mendampingi proses audit.
- 2) Investigasi Independensi, meliputi kemudahan memperoleh semua catatan, prosedur, dan personalia yang relevan dengan pemeriksaan, kerja sama yang aktif dari personalia manajemen selama pemeriksaan, bebas dari pembatasan pemeriksaan atau perolehan bukti-bukti, bebas dari kepentingan individu yang mengarah pada pengeluaran atau pembatasan pemeriksaan.
- 3) Pelaporan Investigasi meliputi bebas dari kewajiban untuk mengubah dampak atau signifikansi pelaporan fakta, bebas dari tekanan untuk mengeluarkan masalah yang signifikan dari laporan pemeriksaan internal, menghindari menggunakan bahasa ambiguitas, baik secara sengaja maupun tidak, dalam melaporkan fakta, pendapat, rekomendasi, dan interpretasi, bebas dari usaha untuk menghilangkan pertimbangan auditor dalam fakta maupun mengeluarkan pendapat atas laporan pemeriksaan internal.

Ada tiga aspek independensi seorang auditor menurut Mulyadi (1998:49) yaitu independensi dalam fakta, independensi dalam penampilan, dan independensi dalam kompetensi.

- 1) Independensi dalam fakta (*Independence in fact*)

Auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit.

2) Independensi dalam penampilan (*Independence in appearance*)

Aspek ini menyangkut pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya.

3) Independensi dalam kompetensi (*Independence in competence*)

Aspek ini berbicara mengenai hubungan erat kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Korupsi sebagai salah satu bentuk fraud yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, bersifat sangat merusak dan tindakan koruptif penyelenggara negara akan semakin memperparah dampak krisis ekonomi global, karena tanpa krisis ekonomi global akibat yang ditimbulkan oleh korupsi dalam bentuk kerugian keuangan sangat besar dan ditengarai sebagai pemicu utama adanya ekonomi biaya tinggi. Setiap orang dapat menjadi pelaku korupsi, karena pada dasarnya tindakan korupsi terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pelaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui profil pelaku korupsi. Pelaku korupsi juga berupaya untuk menyembunyikan kejahatannya dengan melakukan berbagai manipulasi/rekayasa data keuangan dan melakukan kolusi dengan pihak terkait. Dengan demikian, pihak yang ingin melakukan investigasi kasus korupsi perlu memahami modus operandi yang digunakan pelaku korupsi. Pelaku korupsi tidak akan mampu secara sempurna menutupi perbuatannya. Akan terjadi kejanggalan-kejanggalan yang dapat dideteksi melalui catatan akuntansi ataupun

dokumen-dokumen lain yang terkait dengan korupsinya. Aksioma ini akan membantu dalam pemberantasan korupsi yang terjadi pada entitas pemerintahan.

Disamping itu, penyusunan strategi pemberantasan korupsi juga dibuat dengan mengacu pada kajian mengenai penyebab fraud yang meliputi adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran pelaku fraud. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka strategi yang terpadu akan mengkombinasikan upaya penindakan (represif) dan pencegahan (preventif) dalam pemberantasan korupsi.

Komitmen dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangat tinggi yang ditunjukkan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Seluruh unsur pemerintahan harus mendukung secara penuh upaya percepatan pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh presiden karena pada akhirnya masyarakat akan menuntut akuntabilitas presiden atas komitmen untuk memberantas korupsi pada awal masa jabatannya.

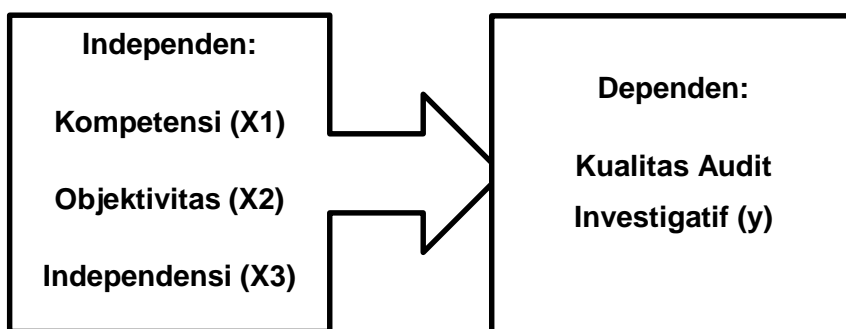
Posisi organisasi BPKP sangat penting dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi untuk membuktikan fraud dan pelaku yang terlibat. Oleh karena itu laporan audit investigatif yang diterbitkan oleh BPKP sangat penting dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Kualitas dari laporan audit investigatif yang dikeluarkan oleh BPKP harus baik agar dapat menunjang fungsi dari laporan tersebut yang dapat membuktikan suatu fraud yang terjadi.

Untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas audit. Kualitas audit dapat dicapai apabila auditor memiliki kompetensi, independensi, dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya.

Teori atribusi menjelaskan bahwa suatu perilaku seseorang dapat ditentukan oleh faktor dalam maupun faktor luar. Kualitas audit dapat dicapai apabila auditor memiliki kompetensi, objektivitas, dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, teori sikap dan perilaku juga menjelaskan hubungan yang erat antara sikap dan perilaku. Sikap independen dan objektivitas auditor sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas audit.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi audit adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dari auditor. Auditor haruslah memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebutuhan auditnya.

Perilaku seseorang menurut teori atribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab baik dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal). Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Kompetensi merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kualitas audit.

Kompetensi auditor sangat berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan auditor. Semakin meningkatnya kompetensi auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sukriah *et al.* (2009), Wirahadi *et al.* (2011), Yusuf (2014), Yusnita (2009), Kharismatuti (2011), Perdany *et al.* (2012), Linting (2013), dan Nizarulalim *et al.* (2007) yaitu untuk melihat pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan atau audit. Penelitian ini menyimpulkan kompetensi berdampak positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan besarnya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan sebagai akibat adanya peningkatan kompetensi auditor Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut.

H1: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif.

2.7.2 Pengaruh Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif

Seorang auditor harus memiliki objektivitas dalam menjalankan fungsinya. Objektivitas diartikan sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Objektivitas mensyaratkan auditor internal untuk tidak mendelegasikan keputusannya (judgment) mengenai masalah audit kepada pihak lain (KOPAI, 2004:32).

Pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit juga didukung oleh teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini, objektivitas merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit investigatif.

Semakin objektif seorang auditor dalam pekerjaannya, maka kualitas audit yang dihasilkan juga baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sukriah *et al.* (2009), dan Yusuf (2014). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H2: Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif.

2.7.3 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif

Kode Etik Akuntan (1994) yang dikutip dari Perdany *et al.* (2012) disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak.

Pengaruh independensi terhadap kualitas audit juga didukung oleh teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini, objektivitas merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirahadi *et al.* (2011), Yusnita (2009), Irawati (2011), Kharismatuti (2011), Perdany *et al.* (2012), Linting (2013), dan Nizarulalim *et al.* (2007) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

H3: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan rumusan masalah penelitian yang bersifat hubungan kausal antar variabelnya. Tujuan penelitian ini adalah uji hipotesis (*hypotheses testing*). Pengujian hipotesis adalah studi yang menjelaskan tentang suatu fenomena dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 1999:89) dalam Linting (2013:22). Tipe penelitian ini adalah studi korelasional (*korelation study*). Studi korelasional menurut Sekaran dan Roger (2009:110) yaitu suatu studi yang menjelaskan atau menggambarkan variabel penting yang terkait dengan masalah tersebut.

Setting penelitian yang akan dilakukan merupakan studi lapangan. Studi lapangan adalah penelitian suatu fenomena tertentu yang menguji hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dengan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tingkat individual karena yang diteliti adalah perilaku auditor secara individual Indriantoro dan Supomo, (1999:94) dalam Linting (2013:33). Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi satu tahap (*cross-sectional study*). Pengumpulan data dilakukan hanya sekali baik

dalam periode hari, minggu, maupun bulan yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran dan Roger, 2009:119). Penelitian ini menggunakan skala likert (*likert scale*) sebagai skala pengukuran.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Jalan Tamalanrea Raya, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan mengambil Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat penelitian karena Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas Audit Investigasi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi untuk wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 6 Desember 2016.

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2008:80) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi populasi menurut Sekaran dan Roger (2009:262) adalah mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa atau hal-hal menarik yang ingin diteliti. Populasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah para auditor pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada penelitian ini tidak seluruh populasi diambil, mengingat jumlah yang banyak dan belum tentu diketahui secara pasti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel dipilih dari para auditor yang bekerja di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh 50 auditor sebagai responden. Sampel menurut Sekaran dan Roger (2009:263) yaitu bagian dari populasi. Sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari suatu populasi. Metode pemilihan sampel yaitu *nonprobability* dengan jenis *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yaitu telah bekerja sebagai auditor lebih dari 3 tahun atau pernah mengikuti diklat Investigatif atau memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau pernah diperankan sebagai ketua tim dalam penugasan bidang investigasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu (1) data dokumenter yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada auditor. (2) data subyek berupa hasil wawancara terhadap beberapa auditor yang bekerja pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para auditor yang bekerja pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenis-jenis dari sumber data sebagai berikut.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.
- b. Data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Sugiyono (2008:142) menyebutkan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menganalisis masalah. Proses penyebaran kuesioner akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kompetensi (X1), objektivitas (X2) dan independensi (X3) yang merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas audit investigatif pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit (Y). Berikut definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini.

3.6.1 Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai keyakinan seorang yang profesional terhadap suatu pekerjaan audit yang kemungkinan (*probability*) dapat ditemukan kesalahan baik atas sistem akuntansi dalam perusahaan maupun menemukan salah saji material dalam laporan keuangan kemudian dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu,

untuk menentukan kualitas audit harus didasarkan pada standar auditing dan standar mutu profesional.

Kualitas audit menurut Kharismatuti (2012:27) berhubungan dengan jumlah respon yang benar yang diberikan seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dibandingkan dengan standar hasil atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. De Angelo (1981) dalam Kharismatuti (2012:27) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien. Kualitas audit bertujuan menyakinkan profesi bertanggungjawab kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu profesional auditor. Kualitas audit menurut Sari (2011:14) yaitu fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya.

3.6.2 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan kapabilitas, keahlian, pengalaman, keterampilan, sikap, kecakapan, dan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan tugasnya dengan teliti, cermat, dan objektif. Kompetensi secara umum berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman auditor. Auditor dalam melaksanakan tugasnya memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi, dan industri objek pemeriksaan

Pengalaman auditor juga penting untuk melihat kompetensi seorang auditor. Pengalaman auditor diukur dengan indikator seperti lamanya waktu dalam bekerja di bidangnya. Auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan yang baik untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Kompetensi auditor dapat tercapai apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor memiliki keahlian, menerapkan kecermatan profesional, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam. Auditor juga dituntut untuk menguasai disiplin ilmu lain yang mendukung pekerjaannya dan mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

3.6.3 Objektivitas

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki objektivitas. Auditor tidak boleh menempatkan penilaiannya atau menilai sesuatu berdasarkan penilaian orang lain. Objektivitas menurut Muljono (1987:14) merupakan suatu sikap yang perlu dikembangkan oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Pusdiklatwas BPKP (2005:59), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya.

Seorang auditor harus selalu bertindak secara objektif berdasarkan bukti-bukti otentik yang diperolehnya selama melakukan pemeriksaan dan sebelum melaporkan hasil auditnya perlu mengadakan review dan pengujian kembali atas data/fakta/informasi yang diperolehnya. Objektivitas adalah suatu sikap mental independen yang harus dijaga oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Objektivitas mengharuskan auditor untuk melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga para auditor meyakini hasil pekerjaannya dan tidak melakukan kompromi terhadap kualitas pekerjaan yang signifikan (KOPAI, 2004:47). Oleh

karena itu, auditor harus mengambil keputusan profesional secara bebas dan obyektif. Dengan adanya sikap objektivitas, penilaian yang dihasilkan tidak bias, tidak memihak, dan bukan merupakan hasil kompromi (Yusnita, 2009).

3.6.4 Independensi

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Christiawan, 2002:86).

Auditor dikatakan profesional dalam melaksanakan tugasnya jika memiliki independensi. Menurut Hery (2010:74) dalam Linting (2013:12) independensi adalah suatu kemandirian yang dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka. Sedangkan menurut Sawyer's *et al.* Independensi (2005:7) merupakan suatu sikap yang harus bebas dari hambatan, memberikan opini yang obyektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah yang sebenarnya, bukan berdasarkan keinginan eksekutif atau lembaga. maka Independensi auditor pemerintah adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor pemerintah berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor pemerintah. Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998). Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

3.7 Instrumen penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diambil dari penelitian sebelumnya. Variabel kompetensi menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Perdany (2012), variabel objektivitas menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari M. Yusuf (2012) dengan beberapa penyesuain, dan variabel independensi menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Perdany (2012). Sedangkan untuk variabel dependen kualitas audit investigatif menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari Perdany (2012) dengan beberapa penyesuain. Instrumen kuesioner tersebut menggunakan skala *Likert*. Setiap pertanyaan dijawab dengan kriteria, STS: Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, N: Netral, S: Setuju, SS: Sangat Setuju.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian (Sugiyono, 2010:147). Statistik deskriptif dapat

digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.

3.8.2 Model Analisis Data

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*). Korelasi berganda adalah hubungan dari beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, hubungan kedua variabel tersebut disebut analisis regresi berganda. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan : Y : Kualitas Audit Investigatif

X1 : Kompetensi

X2 : Objektivitas

X3 : Independensi

α : Konstanta.

β : Koefisien Regresi.

e : Error

3.8.3 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi). Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang

dikumpulkan. Pengujian validitas dan reabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Wijaya, 2012:119 dalam Linting 2013:39).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *korelasi product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap *valid*. Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak *valid* dan harus dikeluarkan dari pengujian.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil dari waktu ke waktu (Wijaya, 2012:115 dalam Linting 2013:39).

Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengukuran one shot. Satu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 . Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan SPSS Versi 20.0.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang

akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitas.

1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ghazali (2016:154).

Pengujian normalitas data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui grafik histogram dan normal PP Plot.

2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari besaran korelasi antar variabel independen penelitian, nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF)). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terdapat problem multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dilihat dari besaran korelasi antar variabel independen, jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Sedangkan jika dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF, nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. (Ghozali, 2016:103-104)

3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Wijaya, 2012:130) dalam Linting (2013:30).

Gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai residual dan variabel dependen suatu penelitian. Jika terdapat pola tertentu maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.8.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik dan uji Koefisien Determinasi (R^2). Uji statistik t menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi adalah 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikansi secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai $\geq 0,05$, maka hipotesis ditolak yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah perbandingan antara variasi Y (dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien ini menunjukkan persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Wijaya, 2012:104) dalam Linting (2013:30).

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif. Artinya, semakin tinggi kompetensi akan mengakibatkan semakin tinggi pula kualitas audit investigatif.
2. Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif. Artinya, semakin tinggi objektivitas, akan mempengaruhi tingginya kualitas audit investigatif.
3. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif. Dengan kata lain hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak

5.2 Keterbatasan Penelitian

Kualitas data hasil penelitian ini dapat berkurang akibat adanya keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan itu dapat disebabkan oleh ambiguitas kuesioner yang menyebabkan respon yang berbeda dari responden dalam menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, tingkat kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan dan memahami arti pentingnya penelitian ini juga berbeda, yang berdampak pada hasil pengolahan data input kuesionernya.

5.3 Saran

Berdasarkan atas kesimpulan penelitian, direkomendasikan beberapa saran kepada penelitian berikutnya yang terkait dengan kualitas audit investigatif yaitu:

1. Agar penelitian serupa juga dilakukan di BPKP Provinsi lainnya untuk melihat ukuran kualitas audit investigatif lainnya. Selain itu, dapat lebih memperluas jumlah sampel atau unit analisis penelitiannya agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.
2. Apabila variabel penelitian selanjutnya menggunakan variabel dependen dan independen yang sama dengan peneliti, metode penelitian yang dilakukan sebaiknya menggunakan metode kualitatif, untuk melihat perbedaan hasil penelitian antara metode kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif yang peneliti gunakan saat ini.
3. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara terstruktur kepada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Afridian Wirahadi,dkk. 2011. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi pada Inspektorat Kabupaten Pasaman. Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 6 No.2, (Desember): Universitas Politeknik Padang.
- Ahmad, A. Wahidin., Sriyunianti, F., Septriani, Y. 2011. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, (Online) Vol. 6, Hal. 63-73, (<http://ojs.polinpdg.ac.id/index>, diakses 6 Juli 2016).
- Albrecht, W.Steve, 2012. Fraud Examination,Thomson South-Western.
- Alim, M. Nizarul. Trisni Hapsari dan Lilik Purwanti. 2007. Jurnal. PengaruhKompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. SNA X. Makassar.
- Ayuningtyas, Harvita Y. dan Pamudji, S. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit. Diponegoro Journal of Accounting, (Online), Vol.2, No. 1, (<http://eprints.undip.ac.id/36161>, diakses 20 Juni 2016)
- Association of Certified Fraud Examiners. 2007. *Fraud Examiners Manual*, The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- Arens, Alvin A. dan James K. Loebbecke. 2007. *Auditing: Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2003. *Kumpulan Modus Operandi Kasus yang Berindikasi Merugikan Keuangan Negara*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi
- Bologna, Jack. 1993. *Handbook of Corporate Fraud*.Boston; Butterworth-Heinemann.
- Boynton, William C. Johnson., Raymond N. and Kell, Walter G. 2001. "Modern Auditing",Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.
- Christiawan, Yulius Jogi. 2003. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Akuntansi dan Keuangan Vol.4 No. 2 (Nov) Hal. 79-92
- Faisal, Hanif. 2015. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Gatra, Sandro. 2012. Inilah Hasil Audit BPK soal Hambalang. (<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/15532777>, diakses tanggal 1 Oktober 2016).
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Irawati, ST. Nur. 2011. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Makassar*. Skripsi Unhas. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Johnstone Karla M, Audrey A. Gramling, Larry E. Rittenberg. 2013. *Auditing: A Risk-Based Approach to Conducting Audit Quality*. Ninth Edition. America: United States Copyright Act.
- Kharismatuti, Norma. 2012. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Undip.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: YPIA
- Kusharyanti. 2003. Temuan Penelitian Mengenai Kualitas Audit dan Kemungkinan Topik Penelitian di Masa Datang. Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Desember), hal 25-60.
- Linting, Indriyanti. 2013. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Independensi, dan Kinerja Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Pada BRI Inspektorat Makasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Mangkunegara, A. Prabu. 2000. *Kinerja*. Wikipedia Bahasa Indonesia (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>, diakses 24 Mei 2016).
- Messier, W. F. 2000. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. McGraw-Hill.
- Mulyadi. 1998. *Sistem Akuntansi 1*. Edisi 3. Yogyakarta : BPFE
- Mulyono. 1987. *Manajemen Perbankan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta : BPFE
- Perdani, Anisa. Suranta, Sri. 2012. Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif Pada Kantor Perwakilan BPK-RI Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- PerMenPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008

- Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online), (<http://kamusbahasaindonesia.org/pengalaman>, diakses 27 Mei 2016).
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan BPKP. 2008. Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Kelima. Ciawi: Penerbit BPKP
- Pusdiklatwas BPKP. 2007. Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Kelima. Ciawi: Penerbit BPKP
- Rizky. 2009. Auditor BPK Tersangka Baru Kasus ABT Depnakertrans: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21197>. Diakses tanggal 2 Oktober 2016.
- Robbins Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT Indeks
- Sari, N. Nurmalita. 2011. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, obyektifitas, Integritas, Kompetensi, dan Etika Terhadap Kualitas Audit. Skripsi Undip. (Online), (<http://eprints.undip.ac.id/28766/>), diakses 2 Mei 2016)
- Sekaran, Uma, dan B. Roger. 2009. *Research Methods for Business: a skill building approach*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukriah, Ika., Akram., dan Inapty, Biana A. 2009. Pengaruh Kerja, Independensi,obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Diponegoro Journal of Accounting, (Online),Vol.2, No. 1, (<http://blog.umy.ac.id/ervin/files/2012/06/aspsia13.pdf>).
- SPKN BPK-RI 2007 http://www.bpk.go.id/web/?page_id=201
- Soepardi, E. Mulyadi. 2010. Peran BPKP dalam Penugasan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. 2010. Fraud Auditing and Forensic Accounting. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Tuannakota, T. M. 2016. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2003. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta
- . 2001. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- . 1999. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.

- Ahmad, Afridian Wirahadi,dkk. 2011. Pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksaan terhadap kualitas hasil pemeriksan dalam pengawasan keuangan daerah : Studi pada Inspektorat Kabupaten Pasaman. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol 6. No. 2.
- Yusnita, R. Tri. 2010. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Intern terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanya. Jurnal Akuntansi. (Online),Vol. 5,No.1-10, (<http://tryusnita.files.wordpress.com/2009/02/jurnal-aktnsi>), diakses 10 Agustus 2016).
- Yusuf, M. 2014. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Audito. Jurnal. Universitas Negeri Padang

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

BIODATA

Identitas diri

Nama : Yoseph Caesario
 Tempat, Tanggal lahir : Medan, 14 November 1989
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : Jalan Taruma Nagara Timur No. 5, Bandung.
 Telepon Rumah/HP : 081355301253
 Alamat *Email* : p.yoseph1114@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD Bellarminus Bekasi
- b. *Eaton Johnson Midle school North Carolina, United States of America*
- c. SMA Methodist Berastagi, Sumatera Utara
- d. D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- e. S1 Universitas Hasanuddin

Pengalaman kerja

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (2011 - sekarang)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 14 Januari 2017

Yoseph Caesario

LAMPIRAN 2

PETA TEORI/ PENELITIAN TERDAHULU

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
1.	Afridian Wirahadi Ahmad, Fera Sriyunianti, Nurul Fauzi, dan Yosi Septriani (2011), Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman)	Mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 2. Independensi pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 	<p>Dependen: Kualitas audit Inspektorat</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi 	Kompetensi dan Independensi Berpengaruh Signifikan positif Terhadap Kualitas Audit

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
2.	M. Yusuf (2014), Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (studi pada BPKP provinsi Riau)	Mengetahui Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja. 2. Objektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja. 3. Integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja. 	Dependenden: Kualitas Hasil Kerja Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Objektivitas 3. Integritas 	Kompetensi, Objektivitas, dan Integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja auditor
3.	Yulius Jogi Christiawan (2002), Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris			.	Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
4.	ST. Nur Irawati (2011) Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Makasar	Mengetahui Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaruh secara parsial antara kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. 2. Ada pengaruh secara simultan antara kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit 	Dependensi: Kualitas Audit Independensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi 	Kompetensi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit
5.	Ika Sukriah, Akram Biana, dan Adha Inapty (2009), Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	Mengetahui Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 2. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 3. obyektifitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 	Dependensi: Kualitas Hasil Pemeriksaan Independensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman Kerja 2. Independensi 3. Obyektivitas 4. Integritas 5. Kompetensi 	Pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
6.	Rita Tri Yusnita (2009), Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Intern Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaannya (Survei pada BPR yang Ada di Kota Tasikmalaya)	Mengetahui Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Intern Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaruh secara parsial antara kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. 2. Ada pengaruh secara simultan antara kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit 	Dependen: Kualitas Hasil Pemeriksaan Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi 	Kompetensi dan independensi auditor intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaaan

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
7.	Norma Kharismatuti dan P.Basuki Hadiprajitno (2011), Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variable Moderasi (Studi empiris pada internal auditor BPKP DKI Jakarta)	Mengetahui Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variable Moderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit 2. Interaksi Kompetensi dan Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit 3. Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. 	Dependen: Kualitas Audit Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi Moderasi: Etika	kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit
8.	Annisa Perdany dan Sri Suranta (2012), Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta	Mengetahui Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif 2. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit investigatif 	Dependen: Kualitas Audit Investigatif Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi 	kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit Investigatif, sedangkan untuk variabel Independensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit investigatif

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
9.	Indriyanti Linting (2013), Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Independensi, dan kinerja Auditor Internal terhadap Kualitas Audit BRI Inspektorat Makasar	Mengetahui Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Independensi, dan kinerja Auditor Internal terhadap Kualitas Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Independensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 4. Kinerja auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 	Dependen: Kualitas Audit Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Objektivitas 3. Independensi 4. Kinerja 	Kompetensi, Independensi, dan Kinerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan objektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
10.	M. Nizarulalim, Trisna Hapsari, dan Liliek Purwanti. (2007), Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Mengetahui Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 3. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 4. Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 	<p>Dependen: Kualitas Audit</p> <p>Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Etika auditor </p> <p>Moderasi: Etika</p>	Kompetensi, dan independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

LAMPIRAN 3**KUESIONER PENELITIAN**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

RESPONDEN

di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI, OBJEKTIVITAS, dan INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT INVESTGATIF”, saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian sebagaimana terlampir secara jujur dan objektif.

Penelitian ini dilakukan hanya untuk kepentingan studi dan tidak untuk tujuan lain. Identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Bantuan Bapak/Ibu/Saudara sangat besar artinya bagi penelitian ini. Semoga jerih payah Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang audit sektor publik.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

(Yoseph Caesario)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Reponden : _____ (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Umur : _____ tahun

Pendidikan terakhir : D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐

Lama Bekerja : ☐ 5 tahun ☐ – 10 tahun
☐ lebih dari 10 tahun

Jumlah penugasan : ☐ 1-20 penugasan
☐ 20-40 penugasan
☐ lebih dari 40 penugasan

II. KOMPETENSI

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom pilihan:

No	Pernyataan (Variabel Kompetensi)	STS / Sangat Tidak Setuju	TS / Tidak Setuju	RR / Ragu- ragu	S / Setuju	SS / Sangat Setuju
1	Di bangku kuliah (pendidikan formal) saya memperoleh pengetahuan yang sangat berguna dalam proses audit					
2	Saya memahami dan mampu melakukan audit sesuai standar akuntansi dan auditing yang berlaku					
3	Saya memahami hal-hal terkait pemerintahan (di antaranya struktur organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan)					
4	Seiring bertambahnya masa kerja saya sebagai auditor, keahlian auditing saya pun makin bertambah					

No	Pernyataan (Variabel Kompetensi)	STS / Sangat Tidak Setuju	TS / Tidak Setuju	RR / Ragu- ragu	S / Setuju	SS / Sangat Setuju
5	Saya selalu mengikuti dengan serius pelatihan akuntansi dan audit yang diselenggarakan instansi					
6	Dengan inisiatif sendiri saya berusaha meningkatkan penguasaan akuntansi dan auditing dengan membaca literature atau mengikuti pelatihan di luar lingkungan instansi					

(Perdany 2012)

III. OBJEKTIVITAS

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom pilihan:

No	Pernyataan (Variabel Objektivitas)	STS / Sangat Tidak Setuju	TS / Tidak Setuju	RR / Ragu- ragu	S / Setuju	SS / Sangat Setuju
1	Saya dapat diandalkan dan dipercaya					
2	Saya bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan					
3	Saya tidak memihak kepada siapapun yang mempunyai kepentingan atas hasil pekerjaannya					
4	Saya menolak menerima penugasan audit bila pada saat bersamaan sedang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak yang diperiksa					
5	Saya tidak dipengaruhi oleh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya.					

No	Pernyataan (Variabel Objektivitas)	STS / Sangat Tidak Setuju	TS / Tidak Setuju	RR / Ragu- ragu	S / Setuju	SS / Sangat Setuju
6	Dalam melaksanakan tugas, saya tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan					
7	Saya dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi					

(Yusuf 2014)

IV. INDEPENDENSI

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memilih salah satu kolom (kiri atau kanan) yang paling sesuai atau dominan dengan diri Anda dengan memberi tanda (X) pada kolom yang sudah disediakan.

No	Pernyataan (Variabel Independensi)	STS / Sangat Tidak Setuju	TS / Tidak Setuju	RR / Ragu- ragu	S / Setuju	SS / Sangat Setuju
1	Saya merasa tidak independen. Auditee meminta temuan yang ada tidak dicantumkan dalam laporan audit. Saya sulit menolak permintaan auditee tersebut karena yang bersangkutan adalah kenalan baik yang sewaktu-waktu mungkin akan saya butuhkan bantuannya					
2	Saya membatasi lingkup pertanyaan pada saat audit karena auditee masih punya hubungan darah dengan saya					
3	Saya menemukan beberapa kesalahan pencatatan yang disengaja oleh auditee akan tetapi tidak semua kesalahan tersebut saya laporkan kepada atasan karena saya sudah memperoleh fasilitas yang cukup baik dari auditee					
4	Saya memberitahu atasan jika saya memiliki gangguan independensi					
5	Saya tidak peduli apakah saya akan dimutasi karena mengungkapkan temuan apa adanya					
6	Tidak ada gunanya saya melakukan audit dengan sungguh-sungguh. Saya tahu, ada pihak yang punya wewenang untuk menolak pertimbangan yang saya berikan pada laporan					

(Perdany 2012)

V. KUALITAS AUDIT

No	Pernyataan (Variabel Kualitas Audit)	STS / Sangat Tidak Setuju	TS / Tidak Setuju	RR / Ragu- ragu	S / Setuju	SS / Sangat Setuju
1	Saya menjamin temuan audit saya akurat. Saya bisa menemukan sekecil apapun kesalahan / penyimpangan yang ada					
2	Saya tidak pernah melakukan rekayasa. Temuan apapun saya laporkan apa adanya					
3	Saya percaya pada auditee saya kali ini tidak akan saya temui kesalahan / penyimpangan. Sebab sebelumnya saya pernah mengaudit auditee yang sama dan waktu itu tidak ada temuan					
4	Rekomendasi yang saya berikan dapat memperbaiki penyebab dari kesalahan / penyimpangan yang ada					
5	Laporan hasil audit saya dapat dipahami oleh auditee					
6	Audit yang saya lakukan akan dapat menurunkan tingkat kesalahan / penyimpangan yang selama ini terjadi					
7	Hasil audit saya dapat ditindaklanjuti oleh auditee.					
8	Saya terus memantau tindak lanjut hasil audit.					

LAMPIRAN 4

Uji Validitas Variabel Kompetensi

Correlations

		VAR.X1.1	VAR.X1.2	VAR.X1.3	VAR.X1.4	VAR.X1.5	VAR.X1.6	Total
VAR.X1.1	Pearson Correlation	1	,631**	,322*	,196	,322*	-,011	,664**
	Sig. (2-tailed)		,000	,022	,171	,022	,938	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X1.2	Pearson Correlation	,631**	1	,453**	-,019	,296*	,028	,623**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,897	,037	,845	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X1.3	Pearson Correlation	,322*	,453**	1	,554**	,554**	,175	,782**
	Sig. (2-tailed)	,022	,001		,000	,000	,225	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X1.4	Pearson Correlation	,196	-,019	,554**	1	,554**	,175	,630**
	Sig. (2-tailed)	,171	,897	,000		,000	,225	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X1.5	Pearson Correlation	,322*	,296*	,554**	,554**	1	,342*	,782**
	Sig. (2-tailed)	,022	,037	,000	,000		,015	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X1.6	Pearson Correlation	-,011	,028	,175	,175	,342*	1	,405**
	Sig. (2-tailed)	,938	,845	,225	,225	,015		,004
	N	50	50	50	50	50	50	50
Total	Pearson Correlation	,664**	,623**	,782**	,630**	,782**	,405**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,004	
	N	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Objektivitas

Correlations

		VAR.X2.1	VAR.X2.2	VAR.X2.3	VAR.X2.4	VAR.X2.5	VAR.X2.6	VAR.X2.7	Total.X2
VAR.X2.1	Pearson Correlation	1	,169	,383**	,235	,306*	,336*	,518**	,638**
	Sig. (2-tailed)		,239	,006	,100	,031	,017	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X2.2	Pearson Correlation	,169	1	,383**	,235	,306*	,169	,306*	,560**
	Sig. (2-tailed)	,239		,006	,100	,031	,239	,031	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X2.3	Pearson Correlation	,383**	,383**	1	,344*	,857**	,383**	,546**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,006	,006		,015	,000	,006	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X2.4	Pearson Correlation	,235	,235	,344*	1	,301*	,000	,301*	,601**
	Sig. (2-tailed)	,100	,100	,015		,034	1,000	,034	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X2.5	Pearson Correlation	,306*	,306*	,857**	,301*	1	,518**	,457**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,031	,031	,000	,034		,000	,001	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X2.6	Pearson Correlation	,336*	,169	,383**	,000	,518**	1	,306*	,560**
	Sig. (2-tailed)	,017	,239	,006	1,000	,000		,031	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X2.7	Pearson Correlation	,518**	,306*	,546**	,301*	,457**	,306*	1	,713**
	Sig. (2-tailed)	,000	,031	,000	,034	,001	,031		,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Total.X2	Pearson Correlation	,638**	,560**	,794**	,601**	,762**	,560**	,713**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Independensi

Correlations

		VAR.X3.1	VAR.X3.2	VAR.X3.3	VAR.X3.4	VAR.X3.5	VAR.X3.6	Total.X2
VAR.X3.1	Pearson Correlation	1	,604**	,624**	-,142	,373**	,561**	,747**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,325	,008	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X3.2	Pearson Correlation	,604**	1	,932**	-,123	,503**	,814**	,877**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,394	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X3.3	Pearson Correlation	,624**	,932**	1	-,156	,478**	,746**	,853**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,279	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X3.4	Pearson Correlation	-,142	-,123	-,156	1	,146	-,111	,049
	Sig. (2-tailed)	,325	,394	,279		,312	,442	,735
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X3.5	Pearson Correlation	,373**	,503**	,478**	,146	1	,438**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,000	,312		,001	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
VAR.X3.6	Pearson Correlation	,561**	,814**	,746**	-,111	,438**	1	,822**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,442	,001		,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Total.X2	Pearson Correlation	,747**	,877**	,853**	,049	,770**	,822**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,735	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,312 ^a	,097	,038	2,56325

a. Predictors: (Constant), Total.Var.X.3, Total.Var.X.2, Total.Var.X.1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,589	3	10,863	1,653	,190 ^b
	Residual	302,231	46	6,570		
	Total	334,820	49			

a. Dependent Variable: Total.Var.Y

b. Predictors: (Constant), Total.Var.X.3, Total.Var.X.2, Total.Var.X.1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,104	8,605		2,569	,014
	Total.Var.X.1	,280	,272	,156	1,028	,309
	Total.Var.X.2	,136	,257	,078	,528	,600
	Total.Var.X.3	-,196	,107	-,278	-1,834	,073

a. Dependent Variable: Total.Var.Y